

PERAN KEKUASAAN DALAM PENDIDIKAN

Baharudin¹⁾, H. Ibnu Hizam²⁾

^{1,2)}Program Studi Tadris IPS Universitas Islam Negeri Mataram

E-mail: baharudin@uinmataram.ac.id, ibnuhizam@uinmataram.ac.id

Abstrak

Relasi antara kekuasaan dan pendidikan seringkali tidak disadari ada hubungan. Dalam kenyataannya, pelaksanaan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan. Dalam pelaksanaan pendidikan, kekuasaan secara tidak langsung memainkan peran dan pengaruhnya dalam suatu sistem pendidikan selain melalui *hidden curriculum*, juga melalui berbagai kebijakannya. Ada beberapa peran dan pengaruh kekuasaan dalam pelaksanaan pendidikan, yaitu: domestifikasi dan stupidifikasi. Indrokrinasi, demokrasi dalam pendidikan, dan integrasi sosial.

Kata Kunci: Peran, Kekuasaan, Pendidikan

1. PENDAHULUAN

Diskursus relasi antara pendidikan dan kekuasaan seringkali menjadi permasalahan yang tidak pernah ada ujung pangkalnya. Proses pendidikan ternyata sering kali digunakan untuk memperkuat atau melanggengkan struktur kekuasaan yang ada. Pemerintah memanfaatkan pendidikan untuk menata dengan rapi struktur pemerintahan serta kehidupan kebudayaan dalam berbagai sistem dan prosedur. Sistem pemerintahan yang sentralistis biasanya ditopang oleh suatu sistem pendidikan yang sentralistis pula.

Pendidikan merupakan suatu sarana untuk menumbuhkan sikap demokratis, kesatuan bangsa atau nasionalisme, rasa persatuan yang merupakan kapital sosial dari suatu masyarakat. Pembangunan suatu masyarakat hanya dapat terjadi apabila masyarakat tersebut mempunyai capital sosial yang besar dan bukan hanya dana yang cukup atau lembaga-lembaga yang teratur dengan manajemen yang terbuka. Sedangkan para ahli Marxisme pendidikan dimaknai sebagai proses yang memberikan kekuatan kepada individu untuk melawan kekuatan yang membatasi perkembangan dirinya yang diatur oleh kekuatan ekonomi kelompok yang berkuasa atau kelompok kapitalis.

Kekuasaan merupakan suatu potensi yang membuat seseorang di dalam suatu hubungan sosial berada dalam suatu jabatan untuk melaksanakan keinginannya sendiri walaupun mendapat tantangan dari orang lain. Kekuasaan merupakan suatu hal yang masih potensial. Kekuasaan merupakan kemungkinan seseorang dalam relasi sosialnya berada dalam posisi bisa menjalankan apa yang diinginkan, meskipun menghadapi resistensi. Berkaitan dengan kekuasaan Max Weber menyatakan bahwa kekuasaan ada di seluruh bentuk relasi kehidupan sosial manusia. Mulai dari kehidupan di ranah keluarga, lembaga sosial bahkan organisasi kemasyarakatan hingga pada ranah pendidikan.

Peran negara tidak dapat dipisahkan dalam proses pendidikan. negara merupakan suatu unit berdasarkan kekuasaan. Dalam rangka melestarikan kekuasaannya, negara seringkali menjadikan pendidikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Michale W. Apple sebagaimana dikutip Tilaar, yang mengungkapkan bahwa dalam kehidupan bernegara tersangkut dalam pelestarian kekuasaan negara melalui politik kebudayaan. Lebih jauh Tilaar mengungkapkan bahwa politik kebudayaan suatu negara disalurkan melalui lembaga-lembaga pendidikannya. Oleh sebab itu, dalam pendidikan tersalur kemauan-

kemauan politik atau sistem kekuasaan dalam sistem pendidikan dari suatu masyarakat. Biasanya, hal tersebut tidak disadari dalam sistem pendidikan, namun demikian kekuasaan politik secara tidak langsung berada dan merasuk dalam sistem pendidikan dengan bentuk *hidden curriculum*. Tanpa disadari suatu sistem pendidikan melaksanakan cita-cita suatu negara, mau atau tidak mau, sadar atau tidak sadar.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Pendidikan dan kekuasaan menjadi dua hal yang selalu berdampingan, karena pendidikan seringkali dijadikan sebagai salah satu alat untuk mempertahankan kekuasaan.

Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat kembali peranan kekuasaan dalam pendidikan, sehingga diperlukan kajian-kajian yang terkait dengan kekuasaan dan pendidikan dari berbagai literature.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuasaan dan Pendidikan

Kaitan antara pendidikan dan kekuasaan membawa kita kepada masalah ideologi. Sikap masyarakat modern mempunyai ideologi yang menjadi panutan atau *life style* yang membimbing arah perkembangan masyarakat. Dalam kehidupan modern terdapat berbagai jenis ideologi, baik yang sedang marak maupun yang telah mengalami penyesuaian-penyesuaian seperti ideologi liberal yang berubah kepada neoliberalisme, ideologi sosialisme yang telah mengalami kegagalan pada abad ke 20, demokrasi sebagai perkembangan dari ideologi liberal yang kini sedang melanda dunia. Ideologi-ideologi ini ternyata memasuki relung-relung pendidikan bukan hanya dalam strukturnya, tetapi juga dalam isi (kurikulumnya). Dalam tiga dasawarsa terakhir ini ideologi-ideologi klasik seperti kapitalisme, sosialisme dan nasionalisme mulai kehilangan momentumnya, disusul dan diganti dengan ideologi kontemporer seperti: Feminisme, pluralisme, dan post modernisme. Khusus di bidang pendidikan juga diramaikan dengan ideologi-ideologi baru yang menawarkan doktrin-doktrin pendidikan terapi atas krisis yang melanda dunia pendidikan. Di satu sisi hadirnya ideologi-ideologi tersebut memperkaya khazanah pemikiran pendidikan, tetapi di sisi lain bisa membingungkan para perencana dan praktisi pendidikan.

Berdasarkan pemetaan William O'Neil ada dua aliran ideologi besar yang cukup berpengaruh, dengan varian masing-masing, yaitu: *pertama*, ideologi konservatif dengan variansi: fundamentalisme, intelektualisme, dan konservatisme; *kedua*, ideologi liberalis dengan variansi: liberalism, leberalisionisme, dan anarkisme.

Setiap ideologi tersebut memiliki ciri-ciri utama masing-masing aliran dapat digambarkan, *Pertama*. Konservatisme, memandang bahwa konsep yang selama ini digunakan masih tetap aktual dan relevan sehingga tidak perlu perubahan. Secara teologis aliran ini menuju pada teologi *Jabariyah* atau determinisme, bahwa masyarakat pada dasarnya tidak dapat mempengaruhi perubahan sosial. Semuanya Tuhanlah yang menentukan. *Kedua*, liberalisme, akar pandangan liberalisme ini adalah pandangan yang menekankan pengembangan kemampuan, melindungi dan menjunjung tinggi hak dan kebebasan individu. Konsep pendidikannya bertolak dari paradigma Barat tentang rasionalisme dan individualism yang sejarah perkembangan kapitalisme di Barat, dan *ketiga*, anarkisme, kritisisme dan rekonstruksionisme. Aliran ini memandang bahwa pendidikan tidak dapat dilepaskan dari upaya rekonstruksi sosial. Mereka menghendaki perubahan struktur sosial, ekonomi, politik melalui pendidikan. Oleh karenanya pendidikan difungsikan sebagai wahana transformasi sosial, kalau perlu melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi sosial, menuju tatanan sosial yang lebih adil dan manusia.

Peranan ideologi dalam pendidikan di Indonesia misalnya kita lihat dalam Undang-Undang Pendidikan Sistem Pendidikan Nasional yang mendasarkan pendidikan kepada ideologi Pancasila. Pengalaman selama Orde Baru menunjukkan betapa ideologi telah dijadikan sebagai sumber indoktrinasi yang telah mematikan kreativitas peserta didik. Ideologi yang seharusnya menjadi pembimbing telah berubah menjadi alat penekan dari penguasa dalam mengendalikan sistem dan isi pendidikan Nasional.

Pengembangan nasionalisme dalam suatu masyarakat yang pluralistik seperti di Indonesia tentunya menarik perhatian. Sebagai suatu negara baru, pengembangan nasionalisme mempunyai bentuk yang tersendiri dibandingkan dengan negara-negara maju yang telah mapan.

Peran Kekuasaan dalam Pendidikan

Masalah kekuasaan sangat menarik terutama dalam masyarakat modern. Boleh dikatakan

seluruh aspek kehidupan manusia diliputi oleh pengaruh kekuasaan. Dalam kehidupan sehari-hari kita diatur oleh berbagai jenis kekuasaan, seperti kekuasaan meliter, kekuasaan ekonomi, kekuasaan politik dan macam-macam kekuasaan lainnya. Di antara berbagai jenis kekuasaan itu biasanya kekuasaan politik dianggap sangat menonjol dalam kehidupan manusia modern. Tetapi kekuasaan politik hanyalah merupakan sebagian dari apa yang disebut kekuasaan sosial (*social power*). Seorang pakar sosiologi, Gianfranco Poggi membedakan kekuasaan sosial menjadi tiga jenis, yaitu: 1) kekuasaan politik, 2) kekuasaan ekonomi, dan 3) kekuasaan normatif atau ideologi.

Secara teoritik kekuasaan biasanya digolongkan ke dalam dua kategori besar, yaitu: kekuasaan organik dan kekuasaan mekanik, dalam pandangan pertama, teori organik seperti dalam pemikiran Plato dan Aristoteles, sedangkan dalam teori yang mekanik seperti dalam teori kontrak sosial. Dalam teori organik, kekuasaan merupakan lembaga etis dengan tujuan moral. Teori organik beranggapan bahwa kesatuan politik seperti negara merupakan tuntutan dari dalam manusia untuk bersosiasi dengan orang lain. Sebagai makhluk rasional, manusia menyadari bahwa kekuasaan yang membuat hidup menjadi mungkin dan bermanfaat bagi mereka. Kesatuan moral atau sosial berhasil dari kehendak kolektif untuk berhubungan bersama-sama dan memfungsikan diri sebagai anggota masyarakat. Pandangan mekanisme cenderung mengabaikan sifat sosial manusia dan memandang kekuasaan sebagai suatu lembaga artificial yang didasarkan atas tuntutan-tuntutan individu.

Pendidikan dalam masyarakat modern dewasa ini, termasuk di Indonesia telah menjadi wacana public. Dalam masyarakat modern pendidikan bukan lagi urusan keluarga, pendidikan telah menjadi rebutan partai-partai politik, serta menjadi perdebatan para akademisi yang peduli terhadap kemajuan pendidikan suatu bangsa. Proses pendidikan yang sebenarnya adalah proses pembebasan dengan kemampuan kemandirian atau memberikan kekuasaan kepadanya untuk menjadi individu. Pemberian kekuasaan ini atau *empowerment* merupakan ciri dari pendidikan transformatif. Proses individualisasi hanya terjadi melalui partisipasi dalam kehidupan masyarakat berbudaya.

Kekuasaan dalam pendidikan bersifat kekuasaan yang transformatif. Tujuan ialah dalam proses terjadinya hubungan kekuasaan tidak ada

bentuk subordinasi antara subjek dengan subjek yang lain. Kekuasaan yang transformatif bahkan membangkitkan refleksi, dan refleksi tersebut menimbulkan aksi. Orientasi yang terjadi dalam aksi tersebut merupakan orientasi yang advokatif.

Di dalam proses kekuasaan sebagai transformatif terjadi proses transmisi yang diinginkan oleh subyek yang memegang kekuasaan terhadap subjek kekuasaan itu sendiri. Orientasi kekuasaan di sini bersifat orientasi legitimatif. Dengan demikian, yang terjadi dalam proses pelaksanaan kekuasaan adalah suatu aksi dari subjek yang bersifat robotic karena sekedar menerima atau dituangkan sesuatu ke dalam bejana subjek yang bersangkutan. Inilah yang disebut oleh Paulo Freire dengan proses sistem banking (*banking sistem*). Perbedaan selanjutnya dari orientasi advokasi dan orientasi legislatif ialah soal poses perubahan dari refleksi kepada aksi yang meminta waktu. Apalagi apabila proses tersebut berkenaan dengan perubahan kelakuan manusia. Setidaknya ada empat masalah yang berkenaan erat dengan pelaksanaan pendidikan berdasarkan kekuasaan, yaitu:

1. Domestifikasi dan stupidifikasi.

Proses domestifikasi dalam pendidikan dapat dilihat pada bagaimana sekolah, peserta didik, dan para guru harus dijalankan proses pendidikan sesuai petunjuk-petunjuk, baik yang digariskan oleh penguasa ataupun petunjuk-petunjuk yang dibuat oleh lembaga pendidikan itu sendiri. Baik guru maupun peserta didik mengikuti berbagai peraturan yang telah dirumuskan, mempelajari bahan pelajaran buku teks yang tersedia, jenjang pendidikan yang telah ditentukan, dari tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Inilah yang kita anggap sebagai suasana belajar yang ideal dari lembaga pendidikan yang ideal. Tetapi apakah yang terjadi dalam suasana proses pendidikan tersebut di atas? Ternyata proses yang terjadi adalah proses domestifikasi atau penjinakan, yaitu membunuh kreativitas dan menjadikan manusia atau peserta didik sebagai robot-robot yang sekedar menerima transmisi nilai-nilai kebudayaan yang ada. Demikianlah praksis pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan menjadi tempat untuk menjinakkan pribadi-pribadi agar patuh kepada kemauan tuannya. Proses pendidikan menjadi proses domestifikasi anak manusia. Hasilnya bukan pembebasan, tetapi pembodohan (*stupidifikasi*). Proses domestifikasi dalam pendidikan disebut juga imperalisme pendidikan dan kekuasaan. Artinya, peserta didik menjadi

subjek eksploitasi oleh suatu kekuasaan di luar pendidikan dan menjadikan peserta didik sebagai budak-budak dan alat dari penjajahan mental dari yang mempunyai kekuasaan.

Proses domestifikasi dalam pendidikan kita lihat juga dalam perlakuan yang salah mengenai ijazah atau pemujaan ijazah. Ijazah dijadikan alat untuk naik pada tangga sosial, terlepas apakah ijazah tersebut merupakan hasil dari jerih payah untuk mengasah kemampuan diri. Dengan segala cara orang ingin untuk menggapai ijazah, baik diperoleh secara legal maupun illegal dengan jalan membeli. Ijazah telah merupakan suatu penyakit. Proses pembodohan di lembaga-lembaga pendidikan formal juga terlihat di dalam evaluasi pendidikan. Pengaruh tes objektif merupakan suatu proses domestifikasi karena tidak mengajak manusia berpikir, tetapi menjadikan manusia yang menghadapi kehidupan sebagai menghadapi teka-teki silang saja. Kemampuan analisis dan mencari alternatif yang terbaik dalam situasi yang dihadapi tentunya tidak dapat dikembangkan melalui tes objektif ini. Tes objektif tidak mengembangkan kemampuan rasio manusia dan bahkan melumpuhkan kemampuan berpikir manusia. Tes objektif seakan-akan mengarah kepada epistemologi mengenai kebenaran yang mutlak tanpa ada alternatif.

2) Indoktrinasi.

Proses pendidikan mengenal kekuasaan dalam pengertian yang berorientasi kepada advokasi dan kekuasaan yang berorientasi kepada legitimasi. Kurikulum yang berlaku pada suatu sekolah sebenarnya merupakan sarana indoktrinasi dari suatu sistem kekuasaan. Biasanya para pendidik, juga masyarakat luas, tidak menyadari apa sebenarnya peranan kurikulum di dalam proses pemberdayaan peserta didik. Apabila kita lihat penyusunan kurikulum persekolahan di Indonesia yang silih berganti, menunjukkan betapa kekuasaan yang berlaku menancapkan kukunya dalam menentukan isi kurikulum. Sesuai dengan sistem pemerintahan pada waktu itu, kurikulum pada semua tingkat pendidikan merupakan rekayasa yang dibuat oleh pemerintah. Tidak ada kebebasan dari lembaga pendidikan dari taman kanak-kanak sampai pendidikan tinggi untuk menyusun kurikulumnya sendiri. Semua aspek kurikulum sudah diatur begitu rupa sesuai dengan proses domestifikasi yang telah dijelaskan di atas. Maka yang terjadi dalam proses pendidikan sebenarnya

adalah suatu proses menransmisikan ilmu pengetahuan secara paksa.

Pengetahuan (*knowledge*) dapat dipandang sebagai suatu capital. Seperti halnya banyak orang mengumpulkan capital, demikian pula orang berjuang untuk mengumpulkan ilmu pengetahuan sebagai capital. Dan capital itu merupakan sumber kekuasaan. Tidak mengherankan apabila pemerintah mempunyai kepentingan untuk menguasai pendidikan dan khususnya kurikulum. Melalui kurikulum inilah terjadi proses indoktrinasi, yaitu proses untuk mengekalkan struktur kekuasaan yang ada. Menguasai pendidikan berarti menguasai kurikulum. Pierre Bourdieu mengatakan, bahwa dalam masyarakat terdapat struktur-struktur tertentu yang mengatur tingkah laku para anggotanya. Dalam hal ini kurikulum dari sistem pendidikan suatu masyarakat berfungsi sebagai *doxa* (struktur tertentu) yang mengatur dan mengarahkan tingkah laku para anggotanya.

Apabila kurikulum berisi indoktrinasi maka cara menyampaikan proses belajar-mengajar juga mengikuti pola domestifikasi dan indoktrinasi jelas merupakan suatu proses transmisi dari kebudayaan. Dengan jalan demikian, kebudayaan sebenarnya menghadapi stagnasi karena matinya daya kreatifitas dari para anggotanya. Proses pendidikan seperti yang telah dijelaskan merupakan proses transmisi kebudayaan dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

Manajemen pendidikan yang cocok dengan proses indoktrinasi tentunya haruslah terpusat dan mudah dikontrol. Yang diterapkan dalam sistem yang demikian ialah manajemen berdasarkan control (*management by control*) dan bukan manajemen yang berdasarkan tujuan (*management by objective*).

3) Demokrasi dalam pendidikan

Demokrasi memang tidak memproudksi sesuatu yang berbentuk barang, namun demokrasi telah melahirkan produk dalam bentuk manusia yang lebih bebas. Melalui demokrasi melahirkan danya kemungkinan-kemungkinan yang terbuka yang dihadapi kepada seseorang. Inilah yang disebut situasi-situasi problematis dan bukan penuangan pengetahuan yang sudah dikunyah terlebih dahulu dari sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan tersebut dapat berupa petunjuk pemerintah melalui kurikulum yang telah disiapkan dan dilaksanakan oleh para pendidik sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang telah terinci.

Isi kurikulum ternyata ditentukan oleh perspektif dari mana seseorang memandang proses pendidikan. Dengan kata lain, kurikulum disusun berdasarkan perspektif tertentu. Perspektif ilmu pengetahuan manusia yang berbeda-beda akan menghasilkan ilmu yang berbeda-beda pula. Dewasa ini dalam rangka reformasi pendidikan nasional orang berduyun-duyun memperbaiki kurikulum, antara lain yang populer dewasa ini kurikulum berdasarkan kompetensi atau kurikulum berdasarkan dasar yang luas.

Penyusunan kurikulum kita di dewasa ini masih berpusat pada kekuasaan yang dipegang oleh negara, antara lain ialah menentukan standar-standar atau *benchmarking* dari proses pendidikan. Hal ini memang dapat dijustifikasi asal saja penentuan standar untuk mencapai kualitas bukan merupakan proses *imposing* dari atas. Idealnya manajemen pendidikan nasional berdasarkan kurikulum yang berisi pesan-pesan negara harus disepakati dengan melaksanakan manajemen yang bukan berdasarkan control (*Management by Control*) dan juga tidak mencukupi melaksanakan manajemen berdasarkan tujuan (*Management by Objective*) karena tujuan itu sendiri didesentralisasikan kepada daerah-daerah yang cocok dengan kebutuhan daerah. Yang dibutuhkan dalam manajemen pendidikan dewasa ini adaah *management by vision*, yaitu yang menyatukan visi dari semua anggota masyarakat Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa betapa Pendidikan, termasuk pendidikan, tidak terlepas dari politik, bukan dalam arti politik praktis. Pengalaman kita selama ini ialah pendidikan telah menjadi alat politik praktis dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan proses pendidikan demokratis.

4) Integrasi sosial.

Integritas sosial ternyata tidak dapat diciptakan dengan pemaksaan melalui kekuasaan dari atas. Desentralisasi dan otonomi pemerintahan, baik pusat maupun daerah memiliki peran penting dalam pendidikan dan kebudayaan. Suatu sistem pendidikan yang *uniform* dan otoriter akan mematikan kemampuan untuk mengembangkan budaya lokal yang merupakan batu bata penyusunan budaya nasional. Pendekatan multikultural merupakan suatu keharusan bagi bangsa Indonesia dengan masyarakat yang pluralistik dalam mengembangkan pendidikan dan kebudayaan. Disinilah letak perkerjaan rumah dari

sistem pendidikan nasional di Indonesia, yaitu untuk mengembangkan budaya local dengan menempatkan sumber kekuasaan di tingkat lokal dan kemudian dikembangkan untuk membangun solidaritas sosial pada tingkat bangsa.

Dalam perannya bahwa pendidikan sebagai motor dari perubahan sosial yang radikal, menyebabkan pendidikan jadi rebutan kekuasaan dalam masyarakat. Partai-partai politik menjadikan pendidikan sebagai program yang utama atau sebagai iming-iming utama untuk membujuk rakyat di dalam pemilihan umum atau sebagai sarana untuk melestarikan kekuasaan atau jabatan. Semua itu menunjukkan betapa pendidikan telah beralih dari domain personal ke domain publik. Hal ini dapat kita lihat dengan jelas betapa pendidikan telah dijadikan kebijakan utama untuk kemajuan suatu bangsa.

Hampir semua negara maju, ketika masih pada tahap seperti negara-negara berkembang dewasa ini, mempunyai misi yang jauh ke depan, mereka melihat peran pendidikan di dalam memantapkan kehidupan politiknya sejalan dengan perbaikan kehidupan ekonominya. Tidak mengheran sebagian negara-negara maju tersebut menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama di dalam pembangunannya atau di dalam menjaga kepemimpinan (kekuasaannya) di dunia yang terbuka dewasa ini.

Setiap negara mempunyai ideologi masing-masing sebagai platform untuk menyejahterakan rakyatnya. Dari platform ini dijabarkan berbagai dalam berbagai jenis kebijakan yang akan di tempuh oleh pemerintah beserta aparatnya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama itu.

4. KESIMPULAN

Peran negara tidak dapat dipisahkan dalam proses pendidikan. negara merupakan suatu unit berdasarkan kekuasaan. Dalam rangka melestarikan kekuasaannya, negara seringkali menjadikan pendidikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam kehidupan bernegara tersangkut dalam pelestarian kekuasaan negara melalui politik kebudayaan. Lebih jauh Tilaar mengungkapkan bahwa politik kebudayaan suatu negara disalurkan melalui lembaga-lembaga pendidikannya. Oleh sebab itu, dalam pendidikan tersalur kemauan-kemauan politik atau sistem kekuasaan dalam sistem pendidikan dari suatu masyarakat. Biasanya, hal tersebut tidak disadari dalam sistem pendidikan, namun demikian

kekuasaan politik secara tidak langsung berada dan merasuk dalam sistem pendidikan dengan bentuk *hidden curriculum*. Tanpa disadari suatu sistem pendidikan melaksanakan cita-cita suatu negara, mau atau tidak mau, sadar atau tidak sadar

5. DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, 2008, *Ideologi Pendidikan Islam: Paradigma humanisme Theosentri* Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Bourdieu, 2003, *Homo Academicus* New York: Dantier
- John Dewey, *Democracy and Education an Inroduction to the Philosophy of Education*, dalam buku *Pendidian dan Demokrasi*, 2008, Yogyakarta: Pustaka Peljar 2008
- Max Weber, 1966, *The Theory of Social and Economic Organiration. Diterjemahkan oleh Henderson and Talcott Parsons*, New York: The Free Press
- Tilaar, H.A.R, 2007, *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- _____2008, *Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural,...*
- _____ dan Riant Nugroho, 2008, *Kebijakan dan Pendidikan, Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Penidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tilaar, 2008, *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif Untuk Indoensia*: Jakarta: Grasindo
- William O'Neil, 2003, *Ideologi-Ideologi Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Zainudin Maliki, 2008, *Sosiologi Pendidikan*, Yogyakarta: Gajah Mada University